

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

T.A 2023

LOKA POM DI KOTA DUMAI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2023 Loka POM di Kota Dumai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dumai, 06 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kota Dumai



Ully Mandasari, S.Farm.,Apt,M.H

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepadabaik (*good governance*).

Dumai, 06 Mei 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Di Kota Dumai



Ully Mandasari, S.Farm.,Apt,M.H

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.549.476.765 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.549.521.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.931.499.831 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp85.353.370; Aset Tetap (netto) sebesar Rp25.839.546.461; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp6.600.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.232.000 dan Rp25.931.267.831.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.691.288.331 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.691.288.331). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp25.033.941.530 dan sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp20.342.653.199.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp916.667.588 dikurangi Surplus-LO sebesar

Rp20.342.653.199 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.000.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.660.947.044 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp25.921.267.831.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% thd Angg.	31 DESEMBER 2022	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0	-	12.325.750
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0	-	12.325.750
BELANJA NEGARA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	1.807.071.000	1.807.059.795	100,00	1.695.673.000	1.695.668.217
Belanja Barang	B.4	2.631.450.000	2.631.417.970	100,00	2.302.520.000	2.302.498.403
Belanja Modal	B.5	111.000.000	110.999.000	100,00	707.864.000	707.846.115
JUMLAH BELANJA		4.549.521.000	4.549.476.765	100,00	4.706.057.000	4.706.012.735

Dumai, 07 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai


Ully Mandasari, S.Farm., Apt., M.H

II. NERACA

LOKA POM DI KOTA DUMAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	85.353.370	92.713.557
Jumlah Aset Lancar		85.353.370	92.713.557
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	24.550.714.000	
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.455.343.325	1.591.600.295
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(1.653.097.394)	(768.414.264)
Jumlah Aset Tetap		25.839.546.461	823.186.031
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	17.600.000	17.600.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(11.000.000)	(6.600.000)
Jumlah Aset Lainnya		6.600.000	11.000.000
JUMLAH ASET		25.931.499.831	446.847.485
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	10.232.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	10.232.000
JUMLAH KEWAJIBAN		-	10.232.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	25.931.499.831	916.667.588
Jumlah Ekuitas		25.931.499.831	916.667.588
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.931.499.831	926.899.588

Dumai, 07 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Uly Mandasari, S.Farm., Apt, M.H

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	7.500.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL			
		-	7.500.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.796.827.795	1.705.900.217
Beban Persediaan	D.3	86.810.417	52.412.693
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.247.864.776	1.266.347.427
Beban Pemeliharaan	D.5	38.029.353	18.623.660
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.266.073.611	965.627.865
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	245.450.379	235.412.226
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.681.056.331	4.244.324.088
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(4.681.056.331)	(4.236.824.088)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		25.033.941.530	5.546.118
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.033.941.530	5.546.118
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		20.352.885.199	5.546.118
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		20.352.885.199	- 4.231.277.970

Dumai, 07 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Ully Mandasari, S.Farm., Apt, M.H

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

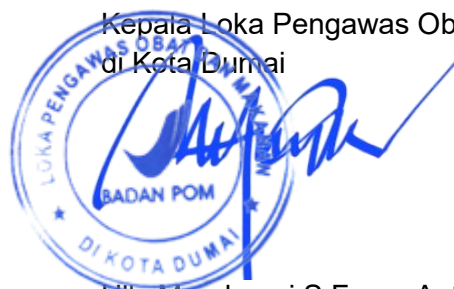
LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	916.667.588	446.083.409
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	20.352.885.199	(4.231.277.970)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.000.000	6.671.032
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap /Lainnya Non Revaluasi	E.3.2	1.000.000	6.671.032
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	4.660.947.044	4.695.191.117
		25.014.832.243	470.584.179
EKUITAS AKHIR	E.5	25.931.499.831	916.667.588

Dumai, 07 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai



Uly Mandasari, S.Farm., Apt, M.H

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.549.476.765 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.549.521.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.931.499.831 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp85.353.370; Aset Tetap (netto) sebesar Rp25.839.546.461; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp6.600.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.232.000 dan Rp25.931.267.831.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.691.288.331 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.691.288.331). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp25.033.941.530 dan sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp20.342.653.199.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1

Januari 2023 adalah sebesar Rp916.667.588 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp20.342.653.199 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.000.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.660.947.044 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp25.921.267.831.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% thd Angg.	31 DESEMBER 2022	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0	-	12.325.750
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0	-	12.325.750
BELANJA NEGARA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	1.807.071.000	1.807.059.795	100,00	1.695.673.000	1.695.668.217
Belanja Barang	B.4	2.631.450.000	2.631.417.970	100,00	2.302.520.000	2.302.498.403
Belanja Modal	B.5	111.000.000	110.999.000	100,00	707.864.000	707.846.115
JUMLAH BELANJA		4.549.521.000	4.549.476.765	100,00	4.706.057.000	4.706.012.735

Dumai, 18 Januari 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Ully Mandasari, S.Farm., Apt, M.H

II. NERACA

LOKA POM DI KOTA DUMAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	85.353.370	92.713.557
Jumlah Aset Lancar		85.353.370	92.713.557
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	24.550.714.000	
Peralatan dan Mesin	C.2.2	2.455.343.325	1.591.600.295
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(1.653.097.394)	(768.414.264)
Jumlah Aset Tetap		25.839.546.461	823.186.031
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	17.600.000	17.600.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(11.000.000)	(6.600.000)
Jumlah Aset Lainnya		6.600.000	11.000.000
JUMLAH ASET		25.931.499.831	446.847.485
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	10.232.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	10.232.000
JUMLAH KEWAJIBAN		-	10.232.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	25.931.499.831	916.667.588
Jumlah Ekuitas		25.931.499.831	916.667.588
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.931.499.831	926.899.588

Dumai, 18 Januari 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Ully Mandasari, S.Farm., Apt, M.H

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	7.500.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	7.500.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.796.827.795	1.705.900.217
Beban Persediaan	D.3	86.810.417	52.412.693
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.247.864.776	1.266.347.427
Beban Pemeliharaan	D.5	38.029.353	18.623.660
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.266.073.611	965.627.865
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	245.450.379	235.412.226
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.681.056.331	4.244.324.088
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(4.681.056.331)	(4.236.824.088)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		25.033.941.530	5.546.118
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.033.941.530	5.546.118
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN POS LUAR BIASA		20.352.885.199	5.546.118
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		20.352.885.199	- 4.231.277.970

Dumai, 18 Januari 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Uly Mandasari,S.Farm.,Apt,M.H

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LOKA POM DI KOTA DUMAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	916.667.588	446.083.409
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	20.352.885.199	(4.231.277.970)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.000.000	6.671.032
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap /Lainnya Non Revaluasi	E.3.2	1.000.000	6.671.032
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	4.660.947.044	4.695.191.117
EKUITAS AKHIR	E.5	25.931.499.831	916.667.588

Dumai, 18 Januari 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Dumai

Ully Mandasari,S.Farm.,Apt,M.H

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka POM di Kota Dumai

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Renstra Loka POM di Kota Dumai memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Loka POM di Kota Dumai Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Loka POM di Kota Dumai sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Loka POM di Kota Dumai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka POM di Kota Dumai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pemandang, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pemandang.
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pemandang yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- b. Aset Tetap
 - Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- c) Pengeluaran yang nilainya tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - i. Tanah
 - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang

Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6 Capaian Output Strategis

Selama periode tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Capaian Output Strategis

No.	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3165.AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Dumai	99.511.000	99.506.263	100,00%	13	13	100%
2	3165.BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kota Dumai	6.419.000	6.419.000	100,00%	4	4	100%
3	3165.QDG	UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh Loka POM di Kota Dumai	33.000.000	33.000.000	100,00%	4	4	100%
4	3165.BKB	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	350.574.000	350.568.967	100,00%	1	1	100%
5	3165.BMB	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Dumai	53.204.000	53.203.020	100,00%	32	38	119%
6	3165.CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	95.051.000	95.050.000	100,00%	1	1	100%
7	3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	15.949.000	15.949.000	100,00%	1	1	100%
8	3165.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	328.685.000	328.684.904	100,00%	1	1	100%
9	3165.PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	94.000.000	93.997.608	100,00%	1	1	100%
10	3165.QCD	Perkara di Bidang Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Dumai	176.858.000	176.857.533	100,00%	2	2	100%
11	3165.QDC	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kota Dumai	95.460.000	95.457.961	100,00%	258	309	120%

LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2023

LOKA POM DI KOTA DUMAI

12	3165.QIA	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kota Dumai	120.360.000	120.357.380	100,00%	153	153	100%
13		Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kota Dumai	205.413.000	250.412.010	100,00%	469	479	102,31%
14	3165.QIC	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM Dumai	91.388.000	91.386.221	100,00%	31	31	100%
15		Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM Dumai	306.601.000	306.598.533	100,00%	157	187	119,11%
16	6834.EBA	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.477.048.000	2.477.028.365	100,00%	1	1	100%
JUMLAH			4.549.521.000	4.549.476.765	100,00%	1.129	950	108,59%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai telah mengadakan revisi Kewenangan Kanwil DJPB dan DJA . Hal ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran halaman III DIPA untuk penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta program penghematan belanja pemerintah melalui *Self-blocking* Mandiri, *Automatic Adjustment* dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sampai dengan 31 Desember 2023, Loka POM di Kota Dumai telah melakukan revisi sebanyak 9 kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi DJA I Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada Desember 2022, dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023, pagu anggaran Loka POM di Kota Dumai di blokir sebesar Rp198.189.000 berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*).
- b. Revisi DIPA II Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 14 April 2023 melalui Revisi Pemutakhiran KPA untuk pemutakhiran data revisi POK.
- c. Revisi DIPA III Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 17 April 2023 melalui Kanwil DJPb Riau dalam rangka revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan II.
- d. Revisi DIPA IV Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 24 September 2023 melalui Revisi Pemutakhiran KPA untuk pemutakhiran data revisi POK.
- e. Revisi DIPA V Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023 melalui Revisi Pemutakhiran KPA untuk pemutakhiran data revisi POK.
- f. Revisi DIPA VI Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 17 Juli 2023 Kanwil DJPb Riau dalam rangka revisi Halaman III DIPA untuk Triwulan III.
- g. Revisi DJA VII Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 23 Juli 2023 dalam rangka Pemotongan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023 sebesar Rp198.189.000 sehingga pagu Loka POM di Kota Dumai menjadi Rp4.268.061.000.

- h. Revisi DIPA VIII Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023 melalui Revisi Pemutakhiran KPA untuk pemutakhiran data revisi POK.
- i. Revisi DIPA IX Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 14 September 2023 melalui Kanwil DJPb Riau dalam rangka revisi antar KRO non PN mengalami perubahan pagu anggaran.
- j. Revisi DIPA X Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka revisi Pemutakhiran data revisi POK.
- k. Revisi DIPA XI Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 27 November 2023 melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka revisi Pemutakhiran data revisi POK.
- l. Revisi DIPA XII Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka revisi Pemutakhiran data revisi POK.
- m. Revisi DIPA XIII Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka revisi Pemutakhiran data revisi POK.
- n. Revisi DIPA XIV Loka POM di Kota Dumai dilakukan pada tanggal 25 Desember 2023 melalui Pemutakhiran KPA dalam rangka revisi Pemutakhiran data revisi POK.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Rincian Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp -	Rp -
Belanja		
Belanja Pegawai (51)	Rp 1.723.800.000	Rp 1.807.071.000
Belanja Barang (51)	Rp 2.631.450.000	Rp 2.631.450.000
Belanja Modal (53)	Rp 111.000.000	Rp 111.000.000
Jumlah Belanja	Rp 4.466.250.000	Rp 4.549.521.000

Realisasi
Pendapatan
Rp0

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp13.046.118. Pendapatan Loka POM di Kota Dumai terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Belanja
Rp4.549.476.765

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp4.549.476.765

Realisasi Belanja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.549.476.765 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp4.549.521.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

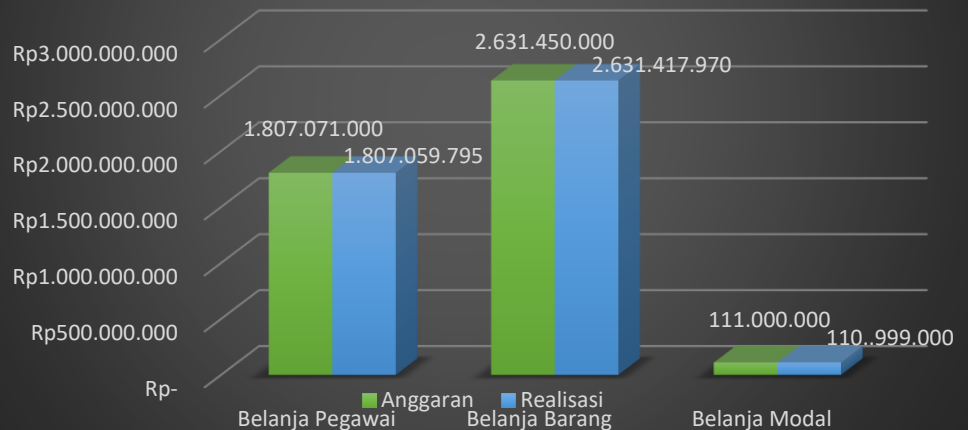
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	Rp 1.807.071.000	Rp 1.807.059.795	100,00
Belanja Barang	Rp 2.631.450.000	Rp 2.631.417.970	100,00
Belanja Modal	Rp 111.000.000	Rp 110.999.000	100,00
Total Belanja Bruto	Rp 4.549.521.000	Rp 4.549.476.765	100,00
Pengembalian		Rp -	
Jumlah	Rp 4.549.521.000	Rp 4.549.476.765	100,00

Total belanja bruto pengembalian belanja komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023



Tabel 7

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 1.807.059.795	Rp 1.695.668.217	6,57
Belanja Barang	Rp 2.631.417.970	Rp 2.302.498.403	14,29
Belanja Modal	Rp 110.999.000	Rp 707.846.115	(84,32)
Jumlah	Rp 4.549.476.765	Rp 4.706.012.735	(3,33)

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan realisasi belanja per 31 Desember 2022 secara total mengalami penurunan. Belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 6,57% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Pada tahun 2023 Pegawai Loka POM di Kota Dumai telah mendapatkan Kenaikan Pangkat dan Jabatan sehingga berpengaruh pada kenaikan gaji pokok dan tunjangan kinerja.
- Kenaikan Gaji Berkala pegawai terhadap gaji pokok.

Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 14,29 disebabkan oleh kenaikan belanja perjalanan dinas karena pada tahun 2023 telah banyak pelatihan

terpadu yang diadakan secara luring dan peningkatan kegiatan KIE. Serta belanja modal mengalami penurunan sebesar (84,32%). Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, tidak banyak perencanaan pengadaan belanja modal untuk Loka POM di Kota Dumai.

Belanja Pegawai
Rp1.807.059.795

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.807.059.795 dan Rp1.695.668.217. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 8

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 836.433.578	Rp 785.921.200	6,43
Belanja Lembur	Rp 781.281	Rp 55.000	1320,51
Belanja Tunjangan Khusus	Rp 942.714.387	Rp 909.692.017	3,63
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 13.345.099	Rp -	N/A
Belanja Tunjangan Khusus PPPK	Rp 13.785.450	Rp -	N/A
Total Belanja	Rp 1.807.059.795	Rp 1.695.668.217	6,57

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 6,57%. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- ASN di Loka POM di Kota Dumai telah mengajukan Kenaikan Pangkat dan Jabatan
- Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan peraturan sehingga mengalami kenaikan pada Gaji

Serta satu orang CPNS tahun 2022 yang telah diangkat menjadi PNS sehingga

pendapatan yang diterima telah 100%.

Belanja Barang
Rp2.631.417.970

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.631.417.970 dan Rp2.302.498.403.

Tabel 9

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	499.520.200	532.917.000	(6,27)
Belanja Barang Non Operasional	303.764.982	288.185.900	5,41
Belanja Jasa	444.579.594	446.008.603	(0,32)
Belanja Pemeliharaan	32.934.593	16.577.000	98,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.266.073.611	965.627.865	31,11
Belanja Barang Persediaan	84.544.990	53.182.035	58,97
Jumlah Belanja	2.631.417.970	2.302.498.403	14,29

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 maka secara keseluruhan mengalami kenaikan realisasi sebesar 14,29%. Kenaikan ini terjadi pada Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Persediaan disebabkan peningkatan pada:

- Pemeliharaan Laptop dan Printer Pegawai
- Pemeliharaan Air Conditioner (AC)
- Pemeliharaan Genset
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- Pembelian Gimmick/Media Promosi Kegiatan KIE
- Pembelian Test Kit Uji Cepat
- Peningkatan Kegiatan Terpadu seperti Bimbingan Teknis, Workshop atau Sosialisasi

Belanja Modal
Rp110.999.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp110.999.000 dan Rp706.696.115. Belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja modal terkait pengadaan Alat Pengolah Data dan Fasilitas Perkantoran.

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.640.000	707.846.115	(84,65)
Jumlah Belanja kotor	108.640.000	707.846.115	(84,65)
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	108.640.000	707.846.115	(84,65)

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar (84,65%).

Tabel 11

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	92.691.000	605.992.115	(553,78)
Pengadaan Alat Pengolah Data	15.949.000	100.704.000	(531,41)
Jumlah Belanja	108.640.000	706.696.115	(550,49)

Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor sebesar Rp92.691.000 terdiri atas pengadaan:

No.	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total
1.	Rak Arsip	2	Rp 2.519.000	Rp 2.519.000
2.	Maket Makanan Berbahaya	1	Rp 5.069.925	Rp 5.069.925
3.	Papan tulis	1	Rp 1.398.000	Rp 1.398.000
4.	Stand TV	2	Rp 1.744.000	Rp 1.744.000

5.	Teropong Digital	1	Rp 5.420.000	Rp 5.420.000
6.	Lemary Display	1	Rp 39.432.750	Rp 39.432.750
7.	Televisi	1	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000
8.	Loudspeaker	1	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
9.	Kaca Hias	1	Rp 9.251.325	Rp 9.251.325
10.	Microphone/Wireless Mic	1	Rp 3.433.000	Rp 3.433.000
11.	Kulkas Mini	1	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
12.	Tablet	1	Rp 15.949.000	Rp 15.949.000
Total			Rp108.640.000	Rp108.640.000

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp85.353.370

C.1 Aset Lancar

C. Jumlah Aset Lancar Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp85.353.370 dan Rp92.713.557. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp85.353.370

C.1.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp85.353.370 dan Rp92.713.557.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Barang Konsumsi	10.873.280	21.272.077
Suku Cadang	51.210.940	56.305.700
Bahan Baku	23.269.150	15.135.780
Jumlah	85.353.370	92.713.557

Semua barang persediaan di Loka POM di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp25.839.546.461

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.839.546.461 dan Rp823.186.031. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Loka POM di Kota Dumai berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan

Tanah

Rp24.550.714.000

C.2.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp24.550.714.000 dan Rp0. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13
Mutasi Nilai Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah :	
• Perolehan lainnya	24.548.355.000
• Pengembangan Nilai Asset	2.359.000
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2023	24.550.714.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	24.550.714.000

Dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah	:	9.000 m ²
Lokasi	:	Jl. Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai
Status Sertifikat BMN	:	Bersertifikat
Jenis Sertifikat	:	Sertifikat Hak Pakai (SHP)
Pemegang Hak	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan
Nomor Sertifikasi	:	SHP 00011 Tahun 2023
Nilai Perolehan Tanah	:	Rp24.548.355.000

Saldo Tanah pada Laporan Barang Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.550.714.000 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah seluar 9000m2 dengan nilai sebesar Rp24.550.714.000 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan tidak terdapat mutasi kurang.

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp24.548.355.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berupa perolehan lainnya dari Alih Status Kementerian ESDM seluas 9.000m2 sesuai berita acara nomor 81.BA/BN.03/SJA.3/2023 dan PL.03.07.1.2.05.23.08 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penyerahan BMN hulu minyak dan gas bumi yang berada pada KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan berupa Tanah dan Harta Benda Modal (Bangunan) yang dipindahkan dan ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) C.Q. Loka POM di Kota Dumai Provinsi Riau dan Biaya Pengurusan Sertipikat Tanah Nomor SHP No.00012 tanggal 30 November 2023 senilai Rp2.359.000 sesuai dengan Surat Keterangan nomor : PL.03.01.7B.7B5.12.23.1143 tanggal 27 Desember 2023.

Peralatan dan
Mesin

Rp2.455.343.325

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.455.343.325 dan Rp1.591.600.295. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		1.591.600.295
Mutasi tambah :		
Pembelian	108.640.000	
Transfer Masuk	755.103.030	
Reklas Masuk	21.369.000	
Total Mutasi Tambah		885.112.030
Mutasi kurang :		
Reklas Keluar	21.369.000	
Total Mutasi Kurang		21.369.000
Saldo per 31 Desember 2023		2.498.081.325
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		(1.643.365.664)
Nilai Buku per 30 September 2023		854.715.661

Mutasi tambah:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp108.640.000 dengan data pembelian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total
1.	Rak Arsip	2	Rp 2.519.000	Rp 2.519.000
2.	Maket Makanan Berbahaya	1	Rp 5.069.925	Rp 5.069.925
3.	Papan tulis	1	Rp 1.398.000	Rp 1.398.000
4.	Stand TV	2	Rp 1.744.000	Rp 1.744.000
5.	Teropong Digital	1	Rp 5.420.000	Rp 5.420.000
6.	Lemary Display	1	Rp 39.432.750	Rp 39.432.750
7.	Televisi	1	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000
8.	Loudspeaker	1	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
9.	Kaca Hias	1	Rp 9.251.325	Rp 9.251.325
10.	Microphone/Wireless Mic	1	Rp 3.433.000	Rp 3.433.000
11.	Kulkas Mini	1	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
12.	Tablet	1	Rp 15.949.000	Rp 15.949.000
Total			Rp108.640.000	Rp108.640.000

Transfer masuk senilai Rp639.132.700,00 merupakan transfer masuk dari Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai BAST Nomor PL.03.01.4A.4A5.02.23.61 tanggal 8 Februari 2023 dan Transfer Masuk dari Deputi Bidang Penindakan Senilai Rp115.970.330,- sesuai BAST Nomor PL.03.03.61.615.11.23.0736 tanggal 13 November 2023 dengan rincian barang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Dari BBPOM Pekanbaru			
1	Spectrophotometer	1	639.132.700
Deputi Bidang Penindakan			
2	Camera Video	1	674.900
3	Camera Digital	1	44.502.675
4	Drone	1	1.398.000
5	Teropong/Keker	1	581.400
6	Telephone Mobile	1	374.900
Total		6	755.103.030

Gedung dan
Bangunan

Rp486.586.530

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp486.586.530 dan Rp0. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 17

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		0
Mutasi Tambah :		486.586.530
• Perolehan lainnya	485.586.530	
• Koreksi Pencatatan Nilai	1.000.000	
Mutasi Kurang :		0
Saldo per 31 Desember 2023		486.586.530
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023		(9.731.730)
Nilai Buku per 31 Desember 2023		476.854.800

Penambahan Gedung dan Bangunan berupa Perolehan Lainnya dengan No BAST PL.03.07.1.2.05.23.08, Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berada pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan berupa Tanah dan Harta Benda Modal (Bangunan) yang dipindahkan dan ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) c.q Loka POM di Kota Dumai Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2023 dengan nilai Rp486.586.530.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(1.635.097.394)

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(1.635.097.394) dan Rp(768.414.264,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.455.343.325	1.643.365.664	811.977.661
2	Gedung dan Bangunan	486.586.530	9.731.730	476.854.800
Total		2.941.929.855	1.653.097.394	1.288.832.461

Aset Lainnya
Rp17.600.000

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.600.000 dan Rp17.600.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai terdiri dari Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud
Rp17.600.000

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Lainnya pada Loka POM di Kota Dumai adalah Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Lainnya tersebut pada Loka POM di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sama yaitu sebesar Rp17.600.000. Aset Lainnya tersebut merupakan pembelian Software Aplikasi SILAIS yang merupakan aplikasi pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.

Tabel 19

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	17.600.000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	17.600.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(11.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.600.000

Akumulasi
Penyusutan/Amortis
asi Aset Lainnya
Rp11.000.000

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp(11.000.000) dan Rp(6.600.000).

Tabel 20

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	17.600.000	11.000.000	6.600.000
	Akumulasi Penyusutan	17.600.000	11.000.000	6.600.000

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp0

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp10.232.000.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.323.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp25.740.691.165

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.931.499.831 dan Rp916.667.588. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara

Bukan Pajak

Rp0

Beban Pegawai

Rp1.796.827.795

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp7.500.000.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.796.827.795 dan Rp1.705.900.217. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21

Rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 742.171.387	Rp 686.523.200	8,11
Beban Uang Makan PNS	Rp 97.375.000	Rp 109.630.000	(11,18)
Beban Uang Lembur	Rp 781.281	Rp 55.000	1.320,51
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	Rp 956.499.837	Rp 909.692.017	5,15
Jumlah	Rp 1.796.827.505	Rp 1.705.900.217	5,33

Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,33%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023, Pegawai Loka POM di Kota Dumai telah mengajukan Kenaikan Pangkat dan Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala serta Pengangkatan PNS Pegawai.

Beban Persediaan
Rp86.810.417

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp86.810.417 dan Rp52.412.693. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 69.593.387	Rp 48.696.673	42,91
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp 17.217.030	Rp 3.716.020	363,32
Jumlah Beban Persediaan	Rp 86.810.417	Rp 52.412.693	65,63

Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Beban Persediaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 65,63% yang disebabkan oleh:

- Pembelian Gimmick Kegiatan KIE
- Pembelian Test Kit Pengujian

Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)

Beban Barang dan
Jasai
Rp1.247.864.776

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.247.864.776 dan Rp1.266.347.427. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	Rp 499.520.200	Rp 532.917.000	(6,27)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 303.764.982	Rp 288.185.900	5,41
Beban Jasa	Rp 444.579.594	Rp 445.244.527	(0,15)
Jumlah	Rp 1.247.864.776	Rp 1.266.347.427	(1,46)

- Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,46%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 sewa kendaraan operasional hanya 1 Unit.

Beban

Pemeliharaan

Rp38.029.353

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.029.353 dan Rp18.623.660. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk pada 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Rincian Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 2.600.000	Rp -	N/A
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp 5.094.760	Rp 2.046.660	148,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 30.334.593	Rp 16.577.000	82,99
Jumlah Beban Persediaan	Rp 38.029.353	Rp 18.623.660	104,20

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 104,2%.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.266.073.611

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.266.073.611 dan Rp965.627.865. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 813.879.397	Rp 693.974.800	17,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 80.733.451	Rp 58.500.000	38,01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 61.270.000	Rp 65.148.930	(5,95)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 310.190.763	Rp 148.004.135	109,58
Jumlah	Rp 1.266.073.611	Rp 965.627.865	31,11

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 31,1%. Kenaikan ini disebabkan karena banyak Pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan Lokakarya dari kegiatan terpadu yang terlaksana pada tahun 2023. Serta bertambahnya kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Dumai.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp245.450.379

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp245.450.379 dan Rp235.412.226. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 26

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 245.450.379	Rp 235.412.226	4,26
Jumlah	Rp 245.450.379	Rp 235.412.226	4,26

Kegiatan Non
Operasional
Rp25.033.941.530

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 27

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	25.033.941.530	5.546.118
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	25.033.941.530	5.546.118
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	25.033.941.530	5.546.118

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp25.033.941.530 berupa Alih Status Tanah Ex Sanggar Karyawan, SHP 04 Teluk Binjai berdasarkan :

- Persetujuan Pemindahan Status Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Migas yang berada pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI c.q. Loka POM Kota Dumai, Provinsi Riau No. S-204/MK.6/2023 tanggal 19 Februari 2023.

- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.76/KM.6/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tanggal 31 Maret 2023.

Berita Acara Serah Terima Penyerahan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berada pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan berupa Tanah dan Harta Benda Modal (Bangunan) yang dipindahkan dan ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) c.q Loka POM di Kota Dumai Provinsi Riau tanggal 19 Mei 2023.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.9 Pos Luar biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp916.667.588*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp916.667.588 dan Rp446.083.409.

*Surplus/Defisit LO
Rp20.352.885.199*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.352.885.199 dan Rp(4.231.277.970). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp1.000.000*

E.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.000.000 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp4.660.947.044

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.660.947.044 dan Rp4.695.191.117. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Badan POM, antar Badan POM, maupun Badan POM dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 28
Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 4.549.476.765	Rp 4.706.012.735
Diterima dari Entitas Lain	Rp -	Rp (13.046.118)
Transfer Masuk	Rp 111.470.279	Rp 2.224.500
Transfer Keluar	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 4.660.947.044	Rp 4.695.191.117

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp4.549.476.765 sedangkan DDEL sebesar Rp0.

Tabel 29
Rincian DDEL dan DKEL per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain terdiri dari :	
Realisasi Belanja Pegawai	Rp 1.807.059.795
Realisasi Belanja Barang	Rp 2.631.417.970
Realisasi Belanja Modal	Rp 110.999.000
JUMLAH DKEL	Rp 4.549.476.765

Ekuitas Akhir :
Rp25.931.499.831

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.931.499.831 dan Rp916.667.588.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Dumai No.HK.02.02.7B.7B5.12.22.1792 tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker Loka POM di Kota Dumai telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran: Ulyy Mandasari, S.Farm.,Apt.

Pejabat Pembuat Komitmen : Hendra Alya, S.Farm, Apt

Pejabat Penandatanganan SPM : Bambang Herianto, A.Md

Bendahara Pengeluaran : Dwi Rafika Rani, S.E

Staff Pengelola Keuangan : Anoko Sultan Aldesra S.P,A.Md

F.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Bank	Nama Rekening	NPWP
1	9890316728491000	PT. Bank BNI Persero.Tbk	BPG120 LOKA POM DI KOTA DUMAI	96.990.794.8-212.000

F.3 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka POM di

Kota Dumai per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 348 unit dengan No. BASO B-PL.03.10.7B.7B5.12.23.1134 tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas Per 31 Desember Tahun 2023	
			Fisik	Aplikasi
1	1010310002000001	Corong Polypropylene dia. 45 mm, As One	1	1
2	1010310002000002	Corong Polypropylene dia. 60 mm, As One	2	2
3	1010310002000003	Corong kaca dia. 70 mm, Normax	20	20
4	1010310002000004	Botol Semprot 500 ml, Nikko	4	4
5	1010310002000005	Beaker Glass 100 ml, Iwaki	15	15
6	1010310002000006	Beaker Glass 250 ml, Iwaki	12	12
7	1010310002000007	Beaker Glass 500 ml, Iwaki	15	15
8	1010310002000008	Beaker Glass 1000 ml, Iwaki	9	9
9	1010310002000009	Beaker Glass 2000 ml, Iwaki	4	4
10	1010310002000014	Erlenmeyer 10 ml, Iwaki	0	30
11	1010310002000015	Erlenmeyer 50 ml, Iwaki	30	48
12	1010310002000016	Erlenmeyer 100 ml, Iwaki	45	45
13	1010310002000017	Erlenmeyer 250 ml, Iwaki	40	40
14	1010310002000018	Erlenmeyer 500 ml, Iwaki	17	17
15	1010310002000019	Erlenmeyer Tutup Asah 500 ml, Iwaki (tutup kaca)	20	20
16	1010310002000028	Rak Tabung Reaksi SS, 40 Hole	0	0
17	1010310002000029	Batang Pengaduk Kaca 200 mm, RRC	14	14
18	1010310002000042	Cultur Tube, Soda Lime Glass w / Screw Cap, Vol. 12 ml (16x100mm)	100	100
JUMLAH			348	348

F.4 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana

yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai seluruhnya telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri.

F.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai saat ini masih berstatus sewa dengan pihak ketiga. Luas bangunan yang digunakan untuk kantor tersebut adalah 270m². Bangunan kantor Loka POM di Kota Dumai terdiri dari bangunan ruko 3 pintu dengan 2 lantai.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai melakukan pengadaan sewa sarana dan prasarana kantor dari 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai juga melakukan pengadaan sewa kendaraan operasional dari 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

F.6 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Loka POM di Kota Dumai terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Loka POM di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp33.000.000** dan realisasi sebesar **Rp33.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker/ Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
3165 Loka POM di Kota Dumai	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	33.000.000	33.000.000	100,00%	UMKM	4	0	0

- b. **PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **7 (tujuh)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp.1.090.080.000** dan realisasi sebesar **Rp1.090.067.246** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker/ Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
3165 Loka POM di Kota Dumai	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	94.000.000	93.997.608	100,00	Laboratorium	1	1	100,00
	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	95.460.000	95.457.961	100,00	Orang	258	309	119,77
	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	120.360.000	120.357.380	100,00	Sampel	153	153	100,00
	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	205.413.000	205.412.010	100,00	Sampel	469	479	102,13

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
3165 Loka POM di Kota Dumai	001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91.388.000	91.386.221	100,00	Sarana	31	31	100,00
	004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	306.601.000	306.598.533	100,00	Sarana	157	187	119,11
	U22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	176.858.000	176.857.533	100,00	Perkara	2	2	100,00
TOTAL		1.090.080.000	1.090.067.246					

F.7 Pengungkapan Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 2 diantaranya terdapat di Loka POM di Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)

Nama Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kota Dumai	51.820.000	51.796.675	99,95	Layanan	29	29,0000	100,00	Non PN
	103.248.000	103.208.180	99,96	Orang	278	278,0000	100,00	PN III
Jumlah	155.068.000	155.004.855						

b. Anggaran Kesehatan (06)

Nama Satker/Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterangan dengan PN
3165 Loka POM di Kota Dumai	99.511.000	99.506.263	100,00	Laporan	13	13	100,00	Non PN
	6.419.000	6.419.000	100,00	Layanan	4	4	100,00	Non PN
	350.574.000	350.568.967	100,00	Laporan	1	1	100,00	Non PN
	95.051.000	95.050.000	100,00	Unit	1	1	100,00	Non PN
	15.949.000	15.949.000	100,00	Unit	1	1	100,00	Non PN
	328.685.000	328.684.904	100,00	Layanan	1	1	100,00	Non PN
	94.000.000	93.997.608	100,00	Laboratorium	1	1	100,00	PN III
	176.858.000	1.176.857.533	665,43	Perkara	2	2	100,00	PN III
	95.460.000	95.457.961	100,00	Orang	258	309	119,77	PN III
	33.000.000	33.000.000	100,00	UMKM	4	4	100,00	PN III
	120.360.000	120.357.380	100,00	Sampel	153	153	100,00	PN III
	205.413.000	205.412.010	100,00	Sampel	469	479	102,13	PN III
	91.388.000	91.336.221	99,94	Sarana	31	31	100,00	PN III
	306.601.000	306.598.533	100,00	Sarana	157	187	119,11	PN III
	2.477.048.000	2.477.028.365	100,00	Layanan	1	1	100,00	Non PN